

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Abstrak.....	vii
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan <i>Luthvi Febryka Nola</i>	149 - 166
Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 <i>Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni, Sulistiowati, Nindyo Pramono</i>	167 - 189
Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata <i>Harris Y. P. Sibuea</i>	191 - 210
Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak <i>Novianto M. Hantoro</i>	211 - 235
Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai? <i>Lidya Suryani Widayati</i>	237 - 257
Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP <i>Prianter Jaya Hairi</i>	259 - 280
Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri <i>Novianti</i>	281 - 300
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Di penghujung tahun 2019 ini Jurnal Ilmiah Negara Hukum kembali hadir bagi pemerhati hukum dan pembaca sekalian. Berbagai masalah hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi inspirasi bagi penulis untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sebagai jurnal di lingkungan Parlemen, selain sebagai wujud pengembangan ilmu di bidang hukum, Jurnal Negara Hukum juga menghadirkan artikel-artikel yang merupakan hasil penelitian dan kajian untuk menjembatani kebutuhan lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsinya, baik fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Penerbitan Jurnal Negara Hukum Edisi November 2019 ini memuat hasil kajian dan penelitian, meliputi hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum internasional.

Publikasi artikel yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses seleksi, review, dan koreksi dari Mitra Bestari dan Dewan Redaksi, serta diputuskan dalam Rapat Dewan Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 7 (tujuh) artikel, yang substansinya akan diuraikan secara singkat.

Artikel pertama ditulis oleh Luthvi Febryka Nola, berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan”. Permasalahan yang dikaji adalah berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 dari perspektif kekuatan mengikat putusan dan implementasinya terhadap *stakeholders* terkait. Permasalahan ini muncul karena Putusan MK tersebut telah mengubah dan meletakkan posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Putusan ini juga memposisikan hak pekerja lain pada posisi utama dibandingkan kreditor preferen lainnya. Sementara itu, sebelum adanya Putusan MK, kedudukan kreditor adalah kreditor separatis, preferen dan konkuren. Upah pekerja termasuk dalam kreditor preferen. Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa Putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan, hanya saja karena Putusan MK berpengaruh terhadap sejumlah undang-undang (UU), sehingga UU terkait tersebut perlu disesuaikan.

Berikutnya, artikel berjudul “Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018” ditulis oleh Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni, Sulistiowati, dan Nindyo Pramono. Artikel ini mengkaji tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (PP OSS). Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogyanya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini

digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.

Pada artikel yang berjudul “Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata”, yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea, dikemukakan bahwa Negara menghadapi sejumlah permasalahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dari artikel ini adalah bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK Pariwisata. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif pada KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang. Hasil penelitian menemukan bahwa KEK Pariwisata atas dasar Peraturan Presiden termasuk proyek strategis nasional yang disesuaikan secara legislasi menjadi objek kepentingan umum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Pemerintah berupaya untuk tetap melaksanakan pembangunan KEK Pariwisata meskipun penyelesaian konflik pertanahan memakan waktu panjang dan harus melewati proses negosiasi ganti rugi dengan masyarakat.

Novianto M. Hantoro dalam artikel “Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak” mengemukakan bahwa hak atas rumah layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Uji materi undang-undang di bidang perumahan menunjukkan adanya permasalahan atas hak tersebut dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran dalam penanganan persoalan pemenuhannya. Selanjutnya, artikel ini membahas peran MK melalui pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap uji materi undang-undang di bidang perumahan dan kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional. Pertimbangan hukum MK telah memerhatikan kepentingan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, serta telah sesuai dengan salah satu aspek dalam hak atas perumahan, yaitu keterjangkauan biaya. Keterjangkauan biaya tidak seharusnya mengabaikan aspek kelayakan. Persoalan perumahan sebagai hak asasi perlu lebih diutamakan dibandingkan perumahan sebagai komoditas. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut berada di tangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat disharmoni antara UU Perumahan dan UU Pemda. Dalam pembagian urusan, penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di UU Pemda hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan penyediaan rumah untuk MBR seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Artikel kelima berjudul “Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?”, ditulis oleh Lidya Suryani Widayati. Artikel ini menyebutkan bahwa *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tahun 1915 tidak mengatur sanksi pidana tutupan. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) kembali mengatur sanksi pidana ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu pidana pokok. Artikel ini mengkaji kebijakan penentuan pidana tutupan dari perspektif pidana terutama dari tujuan pidana. Berdasarkan pada tujuan pidana yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka tujuan pidana tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak ada

ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka pembentuk undang-undang seharusnya merumuskan dengan jelas kriteria bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan.

Selanjutnya, pada artikel yang berjudul “Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP” yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi, dikatakan bahwa pengaturan perbuatan pidana mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan atau alat kontrasepsi merupakan salah satu norma yang disorot oleh masyarakat. Norma ini sesungguhnya merupakan pengaturan kembali, karena secara substansi perbuatan ini sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP yang saat ini masih berlaku. Kedua ketentuan tersebut jika dibandingkan konstruksi pasalnya sudah sangat berbeda satu sama lainnya. Pencantuman kembali norma tersebut, saat ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya lembaga-lembaga swadaya dan advokasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penyuluhan pencegahan penyakit menular seksual. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengaturan kembali perbuatan tersebut sebenarnya bukan ditujukan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang keluarga berencana dan penyuluhan kesehatan, melainkan karena pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali. Konstruksi pasal juga menunjukkan semangat perumus RUU KUHP dalam rangka perlindungan Anak.

Artikel terakhir berjudul “Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” ditulis oleh Novianti. Dalam artikel ini disebutkan bahwa keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi persoalan di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai amanat dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan penanganan pengungsi luar negeri dan implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan pengungsi dari luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan pilihan secara sukarela atau deportasi. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi dan prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antara Perpres tersebut dan UU Keimigrasian.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik sebagai bahan penelitian lanjutan atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga terbuka kemungkinan timbulnya permasalahan hukum baru yang perlu diselesaikan, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah.

Jakarta, November 2019

Redaksi Jurnal Negara Hukum

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan**

Luthvi Febryka Nola

Abstrak

Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan. Kedudukan akan membuat kreditor mendapatkan pembayaran terlebih dahulu namun juga dapat membuat kreditor tidak mendapatkan perlunasan hutang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013, kedudukan kreditor adalah kreditor separatis, preferen dan konkuren. Upah pekerja termasuk dalam kreditor preferen. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah posisi tersebut dan meletakkan posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Putusan ini juga memposisikan hak pekerja lain pada posisi utama dibandingkan kreditor preferen lainnya. Oleh karena itu tulisan ini membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dari perspektif kekuatan mengikat putusan dan implementasinya terhadap *stakeholders* terkait. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja karena Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 berpengaruh terhadap sejumlah undang-undang (UU) membuat UU terkait tersebut perlu disesuaikan. Saat ini penyesuaian belum dilakukan dan akibatnya dalam implementasi putusan terjadi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakefektifan, ketidakmanfaatan, dan penyelundupan hukum.

Kata kunci: implementasi; putusan MK; kepailitan; kedudukan kreditor; upah pekerja

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

**Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni,
Sulistiowati, Nindyo Pramono**

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.

Kata kunci: pendaftaran badan usaha; PP No. 24 Tahun 2018; *Online Single Submission*; OSS

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Harris Y. P. Sibuea

Abstrak

Negara menghadapi sejumlah permasalahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK pariwisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif pada KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang. Hasil penelitian menemukan bahwa KEK Pariwisata atas dasar Peraturan Presiden termasuk proyek strategis nasional yang disesuaikan secara legislasi menjadi objek kepentingan umum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Pemerintah berupaya untuk tetap melaksanakan pembangunan KEK pariwisata meskipun penyelesaian konflik pertanahan memakan waktu panjang dan harus melewati proses negosiasi ganti rugi dengan masyarakat.

Kata kunci: pengadaan tanah; kawasan ekonomi khusus pariwisata; kepentingan umum; penyelesaian konflik pertanahan

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak

Novianto M. Hantoro

Abstrak

Hak atas rumah layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Uji materi undang-undang di bidang perumahan menunjukkan adanya permasalahan atas hak tersebut dan MK memiliki peran dalam penanganan persoalan pemenuhannya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran MK melalui pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap uji materi undang-undang di bidang perumahan dan kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional. Pertimbangan hukum MK telah memerhatikan kepentingan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, serta telah sesuai dengan salah satu aspek dalam hak atas perumahan, yaitu keterjangkauan biaya. Keterjangkauan biaya tidak seharusnya mengabaikan aspek kelayakan. Persoalan perumahan sebagai hak asasi perlu lebih diutamakan dibandingkan perumahan sebagai komoditas. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut berada di tangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat disharmoni antara UU Perumahan dan UU Pemda. Dalam pembagian urusan, penyediaan rumah untuk MBR di UU Pemda hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan penyediaan rumah untuk MBR seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; hak ekonomi; perumahan; Putusan MK

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Pidana Tutupan dalam RUU KUHP:
dari Perspektif Tujuan Pidanaaan, Dapatkah Tercapai?**

Lidya Suryani Widayati

Abstrak

Wetboek van Strafrecht (WvS) tahun 1915 tidak mengatur sanksi pidana tutupan. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) kembali mengatur sanksi pidana ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu pidana pokok. Tulisan ini mengkaji kebijakan penentuan pidana tutupan dari perspektif pidanaaan terutama dari tujuan pidanaaan. Berdasarkan pada tujuan pidanaaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka tujuan pidanaaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka pembentuk undang-undang seharusnya merumuskan dengan jelas kriteria bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan.

Kata kunci: pidana tutupan; tujuan pidanaaan; RUU KUHP

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Salah satu norma dalam RUU KUHP yang mendapat perhatian publik adalah pengaturan perbuatan pidana mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan atau alat kontrasepsi. Norma ini sesungguhnya merupakan pengaturan kembali, karena secara substansi perbuatan ini sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP yang saat ini masih berlaku. Kedua ketentuan tersebut jika dibandingkan konstruksi pasalnya sudah sangat berbeda satu sama lainnya. Pencantuman kembali norma tersebut, saat ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya lembaga-lembaga swadaya dan advokasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penyuluhan pencegahan penyakit menular seksual. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengaturan kembali perbuatan tersebut sebenarnya bukan ditujukan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang keluarga berencana dan penyuluhan kesehatan, melainkan karena pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali. Konstruksi pasal juga menunjukkan semangat perumus RUU KUHP dalam rangka perlindungan anak.

Kata kunci: kebijakan kriminal; KUHP; kontrasepsi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

**Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri**

Novianti

Abstrak

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi persoalan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun belum meratifikasi kedua ketentuan internasional tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai amanat dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan penanganan pengungsi luar negeri dan bagaimana implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan pilihan secara sukarela atau deportasi. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi dan prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antara Perpres tersebut dan UU Keimigrasian.

Kata kunci: pengungsi dari luar negeri; pencari suaka; penanganan pengungsi; Perpres No. 125 Tahun 2016

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Implementation of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013
Related to the Position of Workers' Wages in Bankruptcy***

Luthvi Febryka Nola

Abstract

The position of creditors plays an important role in bankruptcy. The position would fortunate the creditors in receiving immediate payment, but unfortunately would also burden the creditors with unpaid debt settlement. Prior to the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, the positions of creditors were separatist, preferred and concurrent creditors. Workers' wages are included in preferred creditors. However, the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 has changed the position of creditors and put workers' wages higher than other creditors. The decision also positioned other workers' rights in a dominant compared to other preferred creditors. Therefore, this paper discusses Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 from the perspective of the strength of binding decisions and their implementation to relevant stakeholders. As for the results of the discussion, it can be seen that the Constitutional Court Decision has binding force once it was decided. However, because the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 brings consequences for several laws, related laws need to be adjusted. At present, adjustments have not yet been made, and as a result, the implementation of the Decision is challenged with uncertainty, injustice, ineffectiveness, uselessness, and law smuggling.

Key words: *implementation; Constitutional Court Decision; bankruptcy; creditors' position; worker's wages*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Electronic Registration of Business Post-Issuance
of the Government Regulation Number 24 of 2018***

***Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni,
Sulistiowati, Nindyo Pramono***

Abstract

Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (GR OSS) marks a new chapter on the effort to improve the ease of doing business (EoDB) in Indonesia. This paper analyses whether or not it is expedient to integrate business registration into the Ministry of Law and Human Rights (MoLHR) to support Indonesia's EoDB; and examines the legality of the GR OSS from the perspective of the hierarchy of laws. The paper concludes that the integration of business registration into the MoLHR to support Indonesia's EoDB has already been positive, considering that MoLHR is a part of the executive branch, and the registration process is a part of the government administration that should be exercised by the executive. From the perspective of Law Number 12 of 2011, especially ones related to the hierarchy of laws, the GR OSS that also regulates the registration of business is, in fact, contradict with provisions of business registration based on the Commercial Code and Law on Mandatory Company Registration. However, provisions through GR OSS is with logical reasoning based on the principle of expediency, that GR OSS is considered a strategic move to accelerate business data gathering and to improve Indonesia's EoDB.

Key words: *business registration; Government Regulation Number 24 of 2018; Online Single Submission; OSS*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development
on Tourism Special Economic Zone***

Harris Y. P. Sibuea

Abstract

The Government faces a number of challenges in the development of the Tourism Special Economic Zone (SEZ). That challenges to include deliverance of the land acquisition process and the absence of genuine solutions to reduce conflicts. The focus of the problem on this paper is on the legal aspects of the deliverance of land acquisition in the Tourism SEZ. This paper is based on normative juridical research on Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ. The results of this research found that the Tourism SEZ based on Presidential Regulation is a part of national strategic projects that were legally adjusted as objects of public interest in accordance with Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest. The research also shows that the process and mechanism of land acquisition deliverance in Mandalika SEZ and Tanjung Kelayang SEZ have caused land conflicts. The government still tries to continue the development of Tourism SEZ even though land conflicts would take a long time to solve and have to go through compensation negotiations' process with the community.

Key words: *land acquisition; Tourism Special Economic Zones; public interest; land conflict resolution*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger

The Role of the Constitutional Court on the Fulfilment of Citizens' Right to Adequate Housing

Novianto M. Hantoro

Abstract

The right to adequate housing is a part of economic, social and cultural rights. The judicial review of the law in housing sector shows that there are problems with this right and at the same time shows that the Constitutional Court has a role in handling its fulfilment issues. This paper aims to discuss the role of the Constitutional Court through legal considerations in its decision on review of the law in housing sector as well as its suitability with international legal instruments. The legal considerations of the Constitutional Court have paid attention to the interests of the government, private sector, and the citizen, and have been concerned with one aspect of the right to housing, namely affordability. Affordability should not neglect the aspect of adequate housing. The issue of adequate housing as a human right should come first before the issue of housing as a commodity. The obligation to fulfil this right rests with the state and is carried out by the government. There is also a disharmony between the Law on Housing and the Law on Regional Government. According to the Law on Regional Government, the Central Government has the responsibility to provide housing for low-income households. When in fact it should be a shared-responsibility of the central and regional governments.

Key words: *Constitutional Court; economic rights; housing; Constitutional Court Decision*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge

***Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill:
From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?***

Lidya Suryani Widayati

Abstract

Wetboek van Strafrecht (WvS) of 1915 did not regulate undisclosed penitentier. This criminal sanction is included in the Criminal Code (KUHP) through the establishment of Law Number 20 of 1946 on Undisclosed Penitentier. The legislators (the House of Representatives and the Government) re-arranged this criminal sanction in the Criminal Code Bill (RUU KUHP) as one of the main sanctions. This paper examines the policy of determining undisclosed penitentier from punishment perspective, especially from the purpose of punishment. Based on the purpose of punishment that is formulated in the Criminal Code Bill, the purpose of the punishment would not be achieved by using undisclosed penitentier. Undisclosed penitentier also has the potential to cause discrimination because there is no standard for judges to impose these criminal sanctions. To provide legal certainty, the legislators should clearly formulate the criteria for judges to impose undisclosed penitentier.

Key words: undisclosed penitentier; the purpose of punishment; the Criminal Code Bill

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***The Urgency of Rearranging Regulations on Criminal Act of Presenting
Prevention of Pregnancy's Device in the Criminal Code Bill***

Prianter Jaya Hairi

Abstract

One of the norms in the Criminal Code Bill that receives public attention is the matter of regulating criminal act of presenting a device to prevent pregnancy or contraception. This norm is actually a rearrangement, because this act substantially has been regulated in Article 534 of the Criminal Code that is currently still valid. However, if the provisions were compared, each has a very different construction. The problem is that the rearrangement of these norms is currently being rejected by various elements of the society, including non-government organizations and community advocacy groups, especially those working in the field of counselling to prevent sexually transmitted diseases. This study concludes that the decision to rearrange the norm is not intended to ensnare those working in the field of family planning and health education. Religious values and moral considerations are the reasons behind the need to rearrange the article related to prevention of pregnancy's device. The construction of the article also shows the spirit of the drafter of the Criminal Code Bill in the context of child protection.

Key words: *criminal policy; Criminal Code; contraception*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016
on the Handling of International Refugees***

Novianti

Abstract

The existence of asylum seekers and international refugees is a problem in Indonesia and until now Indonesia has not ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees. Although the two has not yet ratified, the Government has issued Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees as mandated by Article 27 of the Law on Foreign Relations. For that reason, the problem discussed in this paper is on how to regulate the handling of refugees and how to implement Presidential Regulation on the Handling of International Refugees. The result of the study indicates that the regulations related to the handling of international refugees is not in accordance with international law and the Law Number 6 of 2011 on Immigration. According to the Presidential Regulation the process of returning the refugees is either voluntary return or deportation. The choices are not in conflict with Indonesia's obligation to uphold refugee protection standards and the principle of non-refoulement. Therefore, it is necessary to harmonize the Presidential Regulation and the Law on Immigration.

Key words: *international refugees; asylum seekers; UNHCR; President Regulations 125/2016*